

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Lokasi penelitian

Banjarmasin adalah kota terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan, yang berada di Indonesia. Kota Banjarmasin dijuluki Kota Seribu Sungai karena wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya Pulau Talas, Pulau Kelayan, Pulau Rantau Keliling, Pulau Insan, Pulau Kembang, Pulau Bromo dan lain-lain (Wikipedia 2026).

Setiap kecamatan Kota Banjarmasin memiliki berbagai keunggulan yang disesuaikan dengan pembagian wilayahnya. Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah pusat pertanian dan ekonomi terpadu, kecamatan Banjarmasin Tengah adalah zona pendidikan dan destinasi wisata, kecamatan Banjarmasin Utara adalah zona pemukiman, sedangkan kecamatan Banjarmasin Timur diperuntukan untuk pengembangan ekonomi pertanian, dan kecamatan Banjarmasin Barat adalah zona perdagangan dan industri.

Selain itu, Kota Banjarmasin masuk ke dalam kawasan metropolitan Banjar Bakula bersama daerah penyangganya yaitu Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala dan Tanah Laut. Di sektor ekonomi, bisnis perhotelan, kuliner dan bisnis lainnya berkembang seiring

dengan datangnya wisatawan ke kota ini. Daya tarik kota ini adalah pasar terapung, menara pandang, dan patung bekantan yang berada di tepian sungai Martapura.

a. Sejarah Kota Banjarmasin

Sebelum tahun 1526, wilayah yang kini dikenal sebagai Kota Banjarmasin merupakan sebuah kampung yang berada di bagian utara muara Sungai Kuin, tepatnya di kawasan yang sekarang menjadi Kelurahan Kuin Utara dan Alalak Selatan. Kampung tersebut bernama Bandar Masih dan terbentuk dari pertemuan lima sungai kecil, yakni Sungai Sipandai, Sungai Sigaling, Sungai Keramat, Sungai Jagabaya, dan Sungai Pangeran, yang seluruhnya bermuara dan membentuk sebuah danau.

Nama Banjarmasin berasal dari gabungan kata “Bandar” dan “Masih”. Penamaan ini berkaitan dengan tokoh Patih Masih atau Patih Ola Masih, yang dalam bahasa Ngaju bermakna orang Melayu. Istilah Bandarmasih dapat diartikan sebagai kampung atau desa orang Melayu. Dalam pelafalan orang Belanda, nama Bandarmasih berubah menjadi Banjarmasin karena kesulitan pengucapan. Hingga tahun 1664, surat-menyurat dari Belanda kepada kerajaan setempat masih menggunakan sebutan “Bandzermash”. Setelah itu, penulisannya berubah menjadi “Bandjarmasin”, dan pada pertengahan abad ke-19 hingga masa pendudukan Jepang tetap disebut Bandjarmasin, yang kemudian dalam ejaan bahasa Indonesia

modern menjadi Banjarmasin.

Selain itu, kota ini juga dikenal dengan sebutan Kota Tatas, yang diambil dari nama Pulau Tatas, sebuah delta yang membentuk wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat dan sebagian Banjarmasin Tengah. Dahulu, kawasan ini menjadi pusat pemerintahan Residen Belanda pada masa Kerajaan Banjar. Perkembangan kota sangat disebabkan oleh keberadaan sungai-sungai yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Secara geografis, Banjarmasin terletak di dataran rendah dan sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Oleh karena itu, kota ini kerap dijuluki sebagai “Kota Air” atau “Kota Seribu Sungai” karena banyaknya aliran sungai yang melintasi wilayahnya.

b. Kondisi Geografis Kota Banjarmasin

Banjarmasin sebagai ibukota provinsi Kalimantan Selatan letaknya diapit oleh dua kabupaten besar, yaitu Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar. Letak astronomisnya antara $3^{\circ}16'46''$ sampai dengan $3^{\circ}22'54''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}31'40''$ sampai dengan $114^{\circ}39'55''$ Bujur Timur. Letak astronomis ini menyebabkan posisi Kota Banjarmasin terletak hampir di tengah-tengah Indonesia (BPS 2022).

Secara geografis kewilayahan, Kota Banjarmasin berbatasan dengan daerah disekitarnya. Adapun batas-batas wilayah Kota Banjarmasin sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Batas Wilayah

No	Batasan	Wilayah Kabupaten
1	Sebelah Timur	Kabupaten Banjar
2	Sebelah Barat	Kabupaten Barito Utara
3	Sebelah Selatan	Kabupaten Banjar
4	Sebelah Utara	Kabupaten Barito Utara

Sumber: BPS 2024

Kota Banjarmasin berada di sebelah Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana memiliki luas wilayah sebesar 98,46 km² yang terbagi dari 5 Kecamatan yaitu:

Tabel 4. 2 Luas Wilayah

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase
1	Banjarmasin Selatan	38,24	25,04
2	Banjarmasin Timur	17,71	17,99
3	Banjarmasin Barat	12,97	20,69
4	Banjarmasin Tengah	6,72	13,21
5	Banjarmasin Utara	22,73	23,07
6	Jumlah	98,37	100,00

Sumber: BPS 2024

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan kecamatan yang terluas dengan persentase sebesar 25,04 persen (38,24 km²) dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya. Selain itu, Banjarmasin menduduki peringkat pertama

sebagai kota dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan (BPS 2022).

Dengan luas wilayah sebesar 98,37 Km², kepadatan penduduk Kota Banjarmasin mencapai 6.727 penduduk/km². Dari angka tersebut, penduduk Kota Banjarmasin merupakan yang terpadat jika dibandingkan dengan seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, kepadatan penduduk Kota Banjarmasin selalu mengalami peningkatan hal ini sejalan dengan terjadinya pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

c. Kondisi Demografi Kota Banjarmasin

Mengutip rilis BPS dalam publikasi Kota Banjarmasin dalam Angka Tahun 2022 (BPS 2022), jumlah penduduk di tahun 2020 mencapai 657.663 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin antara tahun 2020 - 2021 adalah 0,95 persen sehingga diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai sekitar 662.230 jiwa. Sementara itu, kepadatan penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2020 adalah 6.727 jiwa per kilometer persegi.

Pada tahun 2021, rasio jenis kelamin di Kota Banjarmasin sebesar 100,29. Hal ini dapat menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak di bandingkan dengan jumlah penduduk perempuan walaupun selisihnya cenderung kecil. Berdasarkan wilayah kecamatan, maka hampir sekitar 48,11%

penduduk Kota Banjarmasin berdiam di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Utara dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar pada Kecamatan Banjarmasin Tengah yang mencapai 13.160 jiwa/km² (BPS 2022). Untuk lebih mendetailnya data tentang luas wilayah dan jumlah penduduk pada setiap Kecamatannya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Banjarmasin Selatan	163.948	4.330
2	Banjarmasin Timur	118.389	5.070
3	Banjarmasin Barat	136.964	10.451
4	Banjarmasin Tengah	87.479	13.160
5	Banjarmasin Utara	150.883	9.041
6	Jumlah	657.663	6.727

Sumber: BPS 2022

Berdasarkan publikasi Kota Banjarmasin dalam Angka Tahun 2022 (BPS 2022), jumlah penduduk Kota Banjarmasin tercatat sekitar **657.663** jiwa. Data ini memberikan gambaran umum mengenai besarnya populasi yang menjadi bagian dari konteks sosial penelitian. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar tersebut, Kota Banjarmasin memiliki potensi keragaman pandangan dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap berbagai isu, termasuk keberadaan dan pentingnya sertifikasi halal pada produk.

Tabel 4. 4 Jumlah Populasi Muslim Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Populasi Muslim	Total Penduduk
1	Banjarmasin Selatan	158.156	163.948
2	Banjarmasin Timur	116.496	118.389
3	Banjarmasin Barat	130.867	136.964
4	Banjarmasin Tengah	81.498	87.479
5	Banjarmasin Utara	147.329	150.883
6	Jumlah	634.346	657.663

Sumber: BPS 2022

Berdasarkan data kependudukan Kota Banjarmasin tahun 2022, komposisi penduduk menunjukkan dominasi yang sangat signifikan dari penganut agama Islam di seluruh wilayah administratif. Dari total populasi kota sebanyak 657.663 jiwa, estimasi pemeluk agama Islam mencapai 634.346 jiwa atau sekitar 96,45%. Secara spasial, persebaran penduduk Muslim terbesar terkonsentrasi di Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan jumlah mencapai 158.156 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Banjarmasin Utara dengan 147.329 jiwa. Angka yang tinggi di kedua wilayah ini sejalan dengan status keduanya sebagai zona pemukiman terluas dan terpadat di Kota Seribu Sungai menurut proyeksi sektoral Badan Pusat Statistik.

Di sisi lain, meskipun Kecamatan Banjarmasin Tengah memiliki jumlah penduduk Muslim terendah secara absolut, yaitu

sebesar 81.498 jiwa. Dominasi populasi Muslim yang merata di setiap kecamatan ini tidak hanya mencerminkan identitas demografis semata, tetapi juga menjadi fondasi sosial-budaya yang memengaruhi pola interaksi masyarakat serta arah kebijakan pembangunan daerah di Kota Banjarmasin. Secara sosiologis, data ini mengukuhkan bahwa kehidupan sosial masyarakat Banjarmasin masih disebabkan secara kuat oleh nilai-nilai keislaman yang terintegrasi dengan kearifan lokal masyarakat Banjar.

Dalam penelitian ini data kependudukan tidak digunakan sebagai dasar penentuan jumlah informan, melainkan sebagai deskripsi umum wilayah penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan melibatkan sejumlah masyarakat Kota Banjarmasin yang memenuhi kriteria penelitian, guna memperoleh data yang mendalam terkait persepsi, pemahaman, dan preferensi masyarakat terhadap sertifikasi halal. Dengan demikian, data demografis berfungsi sebagai pendukung konteks penelitian, sedangkan analisis berfokus pada temuan kualitatif hasil wawancara dan observasi lapangan.

2. Deskripsi Data

Penelitian ini melibatkan sepuluh informan yang berdomisili di lima kecamatan Kota Banjarmasin. Seluruh informan adalah Muslim dengan latar belakang sosial-ekonomi yang beragam, mencakup mahasiswa, pegawai negeri, karyawan swasta, pensiunan, pedagang, dan

pelaku UMKM. Keberagaman profil tersebut diharapkan dapat memberikan variasi perspektif dalam penelitian.

3. Penyajian Data

a. Persepsi Masyarakat Banjarmasin terhadap Sertifikasi Halal

Ketika informan diminta menjelaskan pengetahuan mereka mengenai sertifikasi halal, seluruh informan mampu memberikan jawaban yang menunjukkan adanya pemahaman dasar yang cukup memadai. Secara umum, sertifikasi halal dipahami sebagai suatu mekanisme resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan kehalalan sesuai dengan ajaran Islam.

Erfan Ma'arif dan Aldi memberikan penjelasan yang relatif sistematis. Erfan memaknai sertifikasi halal sebagai sarana untuk mengetahui apakah suatu produk halal atau tidak untuk dikonsumsi, sedangkan Aldi menekankan aspek legalitasnya, yakni bahwa sertifikasi halal merupakan tanda resmi yang diberikan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Ahmad Rifai mengaitkan sertifikasi halal dengan jaminan kehalalan yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sementara Dwi menyoroti aspek proseduralnya, yaitu adanya proses survei dan verifikasi yang harus dilalui sebelum suatu produk memperoleh sertifikat halal.

"Sertifikasi halal itu sebuah tanda bahwa produk tadi berciri halal. Biasanya diketahui dari label halal pada produk, dan dilegalkan oleh

institusi yang berwenang." (Aldi)

"Yang ku ketahui, sertifikasi halal itu tulisan di produk-produk makanan dan minuman yang sudah dijamin oleh Majelis Ulama Indonesia." (Ahmad Rifai)

"Sertifikasi halal itu bentuk suatu sertifikat dari sebuah lembaga yang menerbitkan sertifikat bagi makanan dan minuman yang halal, yang sudah melewati proses survei dan sebagainya." (Dwi)

"Menurut saya pribadi, sertifikasi halal itu biasanya untuk mengetahui apakah produk itu halal atau tidaknya." (Erfan Ma'arif)

Muse menjelaskan sertifikasi halal secara lebih sederhana sebagai cara agar suatu produk dapat memperoleh label halal. Bambang memahaminya sebagai bentuk informasi dari pihak kementerian bahwa suatu barang atau makanan telah memiliki label halal. Sementara itu, Hj. Norhaida dan Ahmadi memandang sertifikasi halal sebagai proses pendaftaran resmi yang menyatakan bahwa suatu produk telah dinyatakan halal. Ahmadi bahkan menambahkan dimensi religius dengan menyatakan bahwa sertifikasi halal merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh agama sekaligus didukung oleh kebijakan pemerintah, sehingga ia memandangnya bukan semata-mata sebagai regulasi administratif, melainkan sebagai bagian dari kewajiban beragama yang mendapat pengakuan negara.

"Sertifikasi halal itu caranya, cara untuk mendapatkan label halal

itu." (Muse)

"Sertifikat halal itu memberikan informasi bahwa barang atau makanan itu ada label halal dari kementerian." (Bambang)

"Sertifikasi halal, biasanya kalau kita beli apa-apa, itu ada terdaftar halal dari sertifikasinya." (Hj. Norhaida)

"Sertifikasi halal itu apa yang dianjurkan agama dan pemerintah mengenai halal." (Ahmadi)

Pandangan yang cukup khas disampaikan oleh Sri Sofiyarningsih, seorang pelaku UMKM yang memaknai sertifikasi halal tidak hanya dari perspektif konsumen, tetapi juga dari sudut pandang produsen. Ia menegaskan bahwa sertifikasi halal saat ini telah menjadi kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha, sehingga produk yang belum memiliki sertifikat halal berpotensi menghadapi kendala dalam pemasaran maupun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

"Wajib, karena sekarang kalau produk kita tidak pakai halal, bisa kena razia. Tahun 2026 ini sudah diwajibkan." (Sri Sofiyarningsih)

Satu-satunya informan yang mengaku belum memahami secara mendalam mengenai sertifikasi halal adalah Tarno. Meskipun demikian, ia tetap memiliki pemahaman dasar bahwa sertifikasi halal berkaitan dengan penetapan kehalalan suatu produk oleh pihak yang memiliki kewenangan.

"Sertifikasi halal? Kurang paham juga. Yang pasti tentang halal itu."

(Tarno)

Sebagian besar informan menyatakan bahwa sertifikasi halal merupakan hal yang penting, bahkan sangat penting, bagi masyarakat. Alasan yang paling sering dikemukakan adalah karena mayoritas penduduk Banjarmasin, sebagaimana juga masyarakat Indonesia secara umum, beragama Islam sehingga kejelasan status halal suatu produk menjadi kebutuhan yang mendasar.

Dwi memandang sertifikasi halal sebagai bentuk transparansi di tengah banyaknya produk yang beredar dengan status kehalalan yang tidak selalu jelas. Sementara itu, Aldi memberikan penjelasan yang lebih mendalam dengan menyatakan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan spiritual, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan ekonomi yang bersifat primer bagi masyarakat Muslim. Erfan Ma'arif menambahkan perspektif demografis bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab khusus dalam memastikan ketersediaan produk bersertifikat halal bagi masyarakatnya.

"Sangat penting, karena itu bentuk transparansi bagi masyarakat di dunia yang banyak makanan dan minuman tidak jelas halal atau tidaknya." (Dwi)

"Tentu sangat penting, apalagi untuk daerah Banjarmasin yang mayoritas beragama Islam. Sertifikasi halal ini sifatnya lebih ke

ekonomi hal yang primer bagi mayoritas Islam." (Aldi)

"Sangat penting bagi masyarakat, karena agar masyarakat bisa mengetahui bahwa barang atau produk yang dia makan itu apakah halal atau tidaknya. Apalagi di Indonesia jumlah muslimnya terbesar." (Erfan Ma'arif)

Sri Sofiyarningsih juga menambahkan aspek penting yang berkaitan dengan proses produksi. Menurutnya, bahan baku yang pada dasarnya halal masih berpotensi menjadi tidak halal apabila dalam proses pengolahannya terjadi kontaminasi. Sementara itu, Hj. Norhaida mengungkapkan kekhawatiran terhadap kemungkinan adanya campuran bahan yang tidak halal dalam suatu produk. Oleh karena itu, keduanya memandang keberadaan sertifikasi halal sebagai sesuatu yang penting.

"Penting, karena di situ kita mengetahui bahwa makanan kita sebenarnya halal, tapi dalam prosesnya bisa juga tidak halal, misalkan terkena najis atau kotoran." (Sri Sofiyarningsih)

Berdasarkan seluruh jawaban informan, dapat diketahui bahwa mayoritas informan memiliki persepsi yang baik terhadap sertifikasi halal. Meskipun tingkat pemahaman yang dimiliki berbeda-beda, seluruh informan menilai bahwa sertifikasi halal penting karena memberikan kepastian mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi. Selain itu, keberadaan sertifikasi halal juga menimbulkan perasaan aman, tenang, dan nyaman ketika

mengonsumsi suatu produk.

"Perasaannya tenang. Hati tidak was-was, tidak ragu lagi." (Dwi)

"Yang jelas terjaga kehalalannya—tidak merasa berdosa. Lebih aman bagi kita sebagai muslim." (Ahmad Rifai)

"Rasanya aman sudah. Kalau sudah halal, alhamdulillah aman. Jadi kita tidak perlu ragu lagi." (Sri Sofiyaningsih)

"Rasa aman-aman saja, nyaman kayak gitu." (Hj. Norhaida)

"Alhamdulillah. Karena sudah dinyatakan halal, artinya dari tubuh kita sudah menerima bahannya. Sehatlah artinya." (Tarno)

b. Preferensi Masyarakat Banjarmasin dalam Memilih Produk Bersertifikat Halal

Ketika diajukan pertanyaan mengenai posisi sertifikasi halal di antara berbagai faktor pertimbangan pembelian, informan memberikan jawaban yang beragam. Sebagian informan menempatkan sertifikasi halal sebagai pertimbangan utama dalam memilih produk, sedangkan sebagian lainnya mempertimbangkan sertifikasi halal bersama faktor-faktor lain seperti harga, tanggal kedaluwarsa, dan tempat pembelian.

Sebagian informan menempatkan sertifikasi halal sebagai faktor yang paling utama dalam menentukan keputusan pembelian, bahkan sebelum mempertimbangkan harga, merek, ataupun faktor lainnya. Pandangan ini disampaikan oleh Dwi, Muse, Ahmadi, serta Sri Sofiyaningsih. Bagi kelompok informan ini, memastikan

kehalalan produk merupakan langkah pertama yang harus dilakukan sebelum mempertimbangkan aspek lainnya. Bambang juga menyatakan bahwa ia sangat memperhatikan aspek kehalalan dalam memilih produk yang dikonsumsi. Ahmadi memperkuat hal tersebut dengan menyebutkan bahwa sertifikasi halal berada pada urutan pertama dalam pertimbangannya, sedangkan faktor lain dipertimbangkan setelahnya.

"Di bagian paling utama, paling dasar. Halalnya dulu dicek, baru harga atau rasa." (Dwi)

"Pertama dulu sertifikasi halal, baru yang kedua harga, ada BPOM-nya, dan seterusnya." (Sri Sofyaningsih)

"Nomor satu itu. Karena kita apapun yang ibaratnya bukan cuman produk aja, apapun ibaratnya, kayak kerjaan pun kita pasti cari yang halal. Apalagi yang ibaratnya barang yang kita konsumsi." (Bambang)

Sebaliknya, Aldi dan Ahmad Rifai menunjukkan pola pertimbangan yang berbeda. Aldi menjelaskan bahwa langkah pertama yang ia lakukan adalah melihat harga produk, kemudian memeriksa keberadaan sertifikasi halal, dilanjutkan dengan memperhatikan komposisi bahan dan tanggal kedaluwarsa. Ahmad Rifai juga menyatakan bahwa harga dan tanggal kedaluwarsa menjadi pertimbangan awal sebelum melihat status kehalalan produk. Keduanya tetap memperhatikan aspek kehalalan produk,

namun juga mempertimbangkan faktor lain yang dianggap penting dalam proses pembelian. Selain itu, keduanya mengaku memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap produk yang dijual di gerai atau toko resmi.

"Step-by-step saya: pertama harga, lalu apakah sudah ada standarisasi halal, kemudian komposisi, terakhir expired. Jadi halal ada di nomor dua setelah harga." (Aldi)

"Yang pertama harga dulu, baru dilihat expired, baru kehalalannya. Karena sudah ada keyakinan bahwa yang dijual di toko resmi itu halal. Kalau yang dijual di Alfamart misalkan itu sudah halal." (Ahmad Rifai)

Sebagian informan juga membedakan pentingnya sertifikasi halal berdasarkan jenis produk yang dibeli. Bambang menjelaskan bahwa pada produk yang kehalalannya sudah diketahui secara umum, keberadaan sertifikasi halal tidak terlalu menjadi perhatian. Namun, pada produk olahan atau produk hasil industri, sertifikasi halal lebih diperhatikan. Tarno juga menyampaikan pandangan yang serupa. Menurutnya, bahan makanan segar seperti ikan tidak memerlukan sertifikasi halal karena kehalalannya sudah diketahui secara umum. Akan tetapi, pada produk olahan seperti sosis atau makanan siap saji, keberadaan label halal menjadi pertimbangan yang lebih penting. Sementara itu, Hj. Norhaida menilai bahwa produk yang dijual di toko atau supermarket cenderung lebih

dipercaya dibandingkan produk yang tidak diketahui asal-usulnya.

"Kayak misalnya kita beli ikan, enggak usah harus bersertifikat. Tapi kayak kita beli sosis, kita enggak tahu produksinya dari mana—nah, itu baru kita lihat." (Tarno)

Pertanyaan mengenai pengalaman keraguan terhadap produk yang tidak memiliki sertifikasi halal menunjukkan adanya variasi pengalaman di antara informan. Namun, sebagian besar informan mengaku pernah merasa ragu ketika menemukan produk yang tidak memiliki sertifikasi halal, terutama pada produk olahan yang bahan dan proses pembuatannya tidak diketahui secara jelas.

Erfan Ma'arif dan Dwi menyatakan bahwa mereka cukup sering merasakan keraguan ketika menemukan produk yang tidak memiliki sertifikasi halal. Muse menjelaskan bahwa ketika membeli makanan atau jajanan untuk anak-anaknya, ia selalu memeriksa terlebih dahulu keberadaan label halal pada produk tersebut. Apabila tidak ditemukan label halal, produk tersebut biasanya tidak dibeli. Sri Sofyaningsih juga menceritakan pengalamannya ketika menemukan produk permen jelly yang mengandung gelatin dengan sumber yang tidak diketahui secara pasti. Kondisi tersebut membuatnya lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan dikonsumsi.

"Sangat sering merasa ragu. Apakah makanan ini bisa dimakan oleh muslimin atau tidak itu yang selalu jadi pertanyaan." (Dwi)

"Kalau beli sesuatu, anak-anak itu dilihat dulu barangnya—ada sertifikat halalnya atau tidak. Bila tidak ada, tidak usah dibeli."

(Muse)

"Ada permen jelly, mesti ditanya dulu, ada label halalnya atau tidak. Kalau tidak ada label halalnya, tidak beli. Takutnya ada apa-apanya. Gelatin itu kan ada yang dari babi, ada yang dari sapi." (Sri Sofiyaningsih)

"Saya merasa ragu terhadap barang yang tidak ada sertifikasi halalnya. Kayaknya tidak usah jadi dibeli." (Erfan Ma'arif)

Ahmad Rifai menjelaskan bahwa keraguan lebih sering muncul ketika ia berada di daerah yang mayoritas penduduknya non-Muslim atau ketika tidak mengetahui latar belakang penjual produk yang dibeli. Sementara itu, Bambang mengaku pernah mengalami keraguan terhadap beberapa produk dan menilai bahwa saat ini masyarakat semakin berhati-hati dalam memperhatikan informasi mengenai kehalalan produk.

"Kalau daerahnya non-Muslim, ada keraguan. Dan lihat lagi si penjualnya, muslim atau tidak. Kalau kuat dugaan muslim, aman. Tapi kalau dugaanku kuat ini yang jual non-muslim, tidak makan di situ." (Ahmad Rifai)

"Dulu sempat ragu, cuman sekarang makin kesini, ada malah keraguan lagi karena berkembangnya zaman, makin banyak yang perlu dicermati." (Bambang)

Pada pertanyaan mengenai budaya saling percaya antar sesama Muslim dan hubungannya dengan kebutuhan akan sertifikasi halal resmi, hampir seluruh informan mengakui bahwa budaya tersebut masih cukup kuat dalam kehidupan masyarakat Banjarmasin. Sebagian besar menyatakan bahwa mengetahui identitas penjual sebagai seorang Muslim sudah cukup memberikan rasa aman, terutama dalam transaksi di warung makan kecil atau pasar tradisional yang sudah dikenal oleh masyarakat sekitar.

Muse, Hj. Norhaida, Bambang, Ahmad Rifai, Aldi, dan Ahmadi menyampaikan bahwa hubungan sosial dan kepercayaan terhadap sesama Muslim masih menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih produk atau makanan yang dikonsumsi.

"Kalau sudah tahu produknya dari masyarakat sekitar kita, tidak apa-apa, tidak perlu sertifikasi, sudah tahu orangnya. Tapi kalau produk dari luar, ya harus ada sertifikasi halalnya." (Muse)

"Masih percaya, karena yang jualan kan sesama muslim. Di Banjarmasin masih percayalah. Lain dengan di luar Kalimantan Selatan." (Hj. Norhaida)

"Sepertinya itu jadi sebuah kultur, sebuah kebiasaan. Untuk mayoritas Banjar, standar untuk pembeli itu relasinya lebih kepercayaan." (Aldi)

"Sama-sama. 50-50. Soalnya budaya kepercayaan kita sudah mendalam, sudah percaya bahwa masyarakat itu." (Ahmadi)

"Saling percaya masih kuat. Asalkan orangnya orang muslim—dilihat dulu, kuat dugaan muslim, nah boleh." (Ahmad Rifai)

Meskipun demikian, sebagian besar informan tetap menyatakan bahwa keberadaan sertifikasi halal resmi memberikan keyakinan yang lebih besar terhadap produk yang dibeli. Sertifikasi halal dianggap dapat memberikan kepastian tambahan, terutama pada produk kemasan dan produk yang berasal dari luar lingkungan yang dikenal oleh konsumen.

"Melihat identitas penjualnya saja. Tapi kalau ada anjuran dari pemerintah nantinya, tidak apa-apa. Kita sudah tahu orangnya, kebiasaan di warung situ." (Muse)

"Cukup dengan identitas penjual sudah cukup. Label halal tidak terlalu. Tapi kalau sudah ada sertifikat halalnya, lebih bagus lagi, nilainya tambah." (Bambang)

"Kalau sudah bersih, identitasnya muslim, pasti halal juga makanannya. Tapi lebih bagusnya ada halalnya—cuman untuk rumah makan agak ribet prosesnya, mahal biayanya." (Sri Sofiyaningasih)

"Lebih ke melihat kebersihan dan identitas penjualnya saja. Di sini kan banyak yang muslim, sudah otomatis memikirkan apa yang kita makan juga." (Erfan Ma'arif)

Ketika ditanya mengenai harapan terhadap penerapan sertifikasi halal di masa mendatang, hampir seluruh informan berharap agar cakupan sertifikasi halal semakin luas dan dapat menjangkau lebih banyak

pelaku usaha, termasuk warung makan kecil dan usaha kuliner yang belum memiliki sertifikasi halal.

Erfan Ma'arif berharap setiap warung makan memiliki logo halal yang dapat dilihat oleh konsumen. Sri Sofiyaningsih berharap adanya kemudahan dalam proses pengurusan sertifikasi halal bagi UMKM. Sementara itu, Muse dan Ahmad Rifai berharap proses sertifikasi halal dilakukan secara teliti sehingga produk yang memperoleh sertifikat halal benar-benar telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

"Harapannya sertifikasi halal bukan hanya di produk kemasan, tapi kalau bisa sudah ada di setiap warung pinggir jalan ada logonya bahwa warung itu sudah halal atau tidak. Biar lebih nyaman untuk kita kaum muslimin." (Erfan Ma'arif)

"Diharapkan lebih meluas. Rumah makan ada logo halalnya. Kalau pemerintah kasih gratis tidak jadi masalah, cuman agak ribet prosesnya." (Sri Sofiyaningsih)

"Harus benar-benar diteliti, betul tidak halalnya, baru dikasih sertifikasinya. Jangan sampai formalitas saja." (Muse)

"Harapannya semua produk betul-betul halal. Tidak hanya label yang halal, tapi betul-betul dicek. Jangan sampai ada barang yang lolos, padahal tidak halal tapi diloloskan halal." (Ahmad Rifai)

"Harapan ke depannya untuk masalah sertifikasi halal, lebih diutamakan bagi pedagang, bagi kaum muslimin. Karena itu sangat

berpengaruh bagi segi ekonomi dan lainnya." (Dwi)

"Mudah-mudahan pemerintah selalu melindungi masyarakat terhadap makanan-makanan yang diedarkan." (Ahmadi)

B. Pembahasan

1. Persepsi Masyarakat Banjarmasin Terhadap Sertifikasi Halal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Banjarmasin memiliki pemahaman yang baik mengenai sertifikasi halal. Meskipun terdapat perbedaan tingkat pengetahuan antar informan, secara umum mereka mampu menjelaskan bahwa sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan resmi yang diberikan oleh lembaga berwenang untuk menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan halal sesuai syariat Islam. Pemahaman ini terlihat dari penjelasan informan yang mengaitkan sertifikasi halal dengan label halal pada produk, proses pemeriksaan dan verifikasi, serta jaminan kehalalan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang.

Temuan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal telah dipahami tidak hanya sebagai simbol keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme yang memberikan kepastian kepada konsumen mengenai status produk yang mereka konsumsi. Sebagian informan bahkan memahami bahwa sertifikasi halal melibatkan proses pengawasan yang mencakup bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat tidak lagi terbatas pada

keberadaan logo halal semata, tetapi juga mencakup proses yang melatarbelakangi penerbitan sertifikat halal. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Nadiroh 2020) dalam penelitiannya di Kota Medan yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki kesadaran dan pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen dalam memperoleh produk yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Banjarmasin memandang sertifikasi halal sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya sertifikasi halal didasarkan pada kebutuhan masyarakat Muslim untuk memperoleh kepastian mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi. Bagi informan, sertifikasi halal berfungsi sebagai bentuk perlindungan konsumen sekaligus sarana untuk menghindari keraguan terhadap status suatu produk. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek keagamaan masih menjadi faktor utama yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sertifikasi halal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Saputro 2023) yang menemukan bahwa konsumen memiliki persepsi yang baik terhadap produk halal karena dianggap sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan rasa aman dalam penggunaannya.

Dari sisi pengalaman konsumsi, hampir seluruh informan mengungkapkan bahwa keberadaan sertifikasi halal memberikan perasaan tenang, aman, dan nyaman ketika mengonsumsi suatu produk.

Perasaan tersebut muncul karena sertifikasi halal dianggap mampu memberikan kepastian bahwa produk yang dikonsumsi telah sesuai dengan ketentuan agama Islam. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi bagi konsumen, tetapi juga memberikan dampak psikologis berupa rasa tenang dan keyakinan dalam mengambil keputusan konsumsi.

Menariknya, beberapa informan tidak hanya mengaitkan sertifikasi halal dengan aspek agama, tetapi juga dengan aspek keamanan, kebersihan, dan kualitas produk. Mereka beranggapan bahwa produk yang telah memperoleh sertifikat halal telah melalui proses pemeriksaan yang lebih ketat sehingga lebih terjamin keamanannya. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal mulai dipersepsikan sebagai indikator kualitas produk yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya dimaknai sebagai jaminan kehalalan, tetapi juga sebagai jaminan mutu dan keamanan produk.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa budaya saling percaya masih cukup kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam transaksi sehari-hari, terutama di pasar tradisional atau warung makan kecil, identitas penjual sebagai seorang Muslim sering kali menjadi dasar keyakinan konsumen terhadap kehalalan produk yang dijual. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Khaedir 2023) pada konsumen rumah makan Padang di Parepare, di mana kepedulian formal terhadap sertifikat halal

sering kali tereduksi oleh asumsi dasar bahwa produsen Muslim secara otomatis akan mematuhi syariat.

Namun, kondisi tersebut umumnya ditemukan pada produk makanan siap saji atau makanan yang dijual secara langsung oleh pedagang, di mana konsumen dapat mengetahui atau mengenal penjualnya. Berbeda dengan produk makanan kemasan yang diproduksi secara massal, masyarakat cenderung lebih memperhatikan keberadaan sertifikasi atau label halal karena tidak dapat memastikan secara langsung bahan maupun proses produksinya. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan personal saja belum dianggap cukup, terutama pada produk yang proses pembuatannya tidak diketahui secara langsung oleh konsumen, sehingga sertifikasi halal tetap dipandang penting sebagai sumber kepastian kehalalan produk.

Apabila dibandingkan dengan penelitian (Janah and Makhtum 2023), terdapat perbedaan yang cukup menarik. Penelitian tersebut menemukan adanya konsumen yang menganggap sertifikasi halal tidak terlalu penting dan tidak menjadikannya sebagai pertimbangan utama dalam memilih produk. Sebaliknya, dalam penelitian ini hampir seluruh informan menyatakan bahwa sertifikasi halal merupakan hal yang penting. Perbedaan yang muncul hanya terletak pada tingkat pengetahuan dan cara pandang masing-masing informan, bukan pada penting atau tidaknya sertifikasi halal itu sendiri. Hal ini menunjukkan

bahwa sebagian besar informan memandang sertifikasi halal sebagai sesuatu yang penting.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Banjarmasin memandang sertifikasi halal sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Sertifikasi halal dipahami sebagai bentuk pengakuan resmi yang memberikan kepastian mengenai kehalalan produk serta menjadi sarana perlindungan bagi konsumen Muslim. Keberadaan sertifikasi halal juga memberikan rasa aman, tenang, dan nyaman dalam mengonsumsi produk, bahkan oleh sebagian informan dipandang sebagai indikator kebersihan, keamanan, dan kualitas produk. Meskipun terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan cara pandang antar informan, seluruh informan sepakat bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting dalam membantu masyarakat Muslim memilih produk yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan mereka. Selain itu, budaya saling percaya yang masih berkembang di masyarakat tidak sepenuhnya menggantikan peran sertifikasi halal, terutama pada produk yang bahan dan proses produksinya tidak dapat diketahui secara langsung oleh konsumen.

2. Preferensi Masyarakat Banjarmasin Terhadap Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil penelitian, preferensi masyarakat Banjarmasin terhadap produk bersertifikat halal menunjukkan adanya perbedaan dalam urutan prioritas ketika mengambil keputusan pembelian. Sebagian informan menempatkan sertifikasi halal sebagai pertimbangan utama

yang harus dipastikan terlebih dahulu sebelum memperhatikan aspek lain seperti harga, kualitas, maupun merek produk. Bagi kelompok ini, kehalalan produk merupakan syarat mendasar yang tidak dapat ditawar karena berkaitan dengan keyakinan agama dan kewajiban sebagai seorang Muslim. Oleh karena itu, produk yang belum memiliki jaminan kehalalan yang jelas cenderung dihindari meskipun memiliki harga yang lebih murah atau mudah diperoleh.

Di sisi lain, terdapat informan yang menunjukkan pola preferensi yang lebih fleksibel. Mereka tetap menganggap sertifikasi halal sebagai aspek yang penting, namun dalam praktiknya juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti harga, masa kedaluwarsa, serta tempat pembelian produk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan konsumen tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan melibatkan berbagai pertimbangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Meskipun demikian, seluruh informan tetap menjadikan kehalalan produk sebagai aspek yang perlu diperhatikan sebelum produk tersebut dikonsumsi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rafifasha and Nurfahmiyati 2022) yang menunjukkan bahwa preferensi konsumen terhadap produk halal disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk kebutuhan pribadi dan keberadaan jaminan kehalalan produk. Dalam penelitian tersebut, konsumen tidak hanya mempertimbangkan fungsi produk, tetapi juga memperhatikan komposisi dan status halal sebagai bagian

dari proses pengambilan keputusan. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa preferensi terhadap produk halal tidak terbentuk secara sederhana, melainkan merupakan hasil pertimbangan antara kebutuhan konsumen dan keyakinan yang dimiliki.

Penelitian ini juga menemukan bahwa preferensi masyarakat terhadap sertifikasi halal disebabkan oleh jenis produk yang dibeli. Pada produk segar seperti ikan, sayuran, dan bahan pangan mentah lainnya, sebagian informan tidak menjadikan sertifikasi halal sebagai pertimbangan utama karena kehalalan produk tersebut dianggap sudah jelas dan mudah dikenali. Sebaliknya, pada produk olahan dan produk kemasan yang proses produksinya tidak diketahui secara langsung oleh konsumen, keberadaan sertifikasi halal menjadi lebih penting. Konsumen cenderung mencari label halal sebagai bentuk jaminan bahwa produk yang dibeli telah melalui proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbedaan preferensi berdasarkan jenis produk tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki fungsi yang lebih dominan pada produk yang mengandung unsur ketidakpastian. Ketika konsumen tidak memiliki informasi yang cukup mengenai bahan baku maupun proses pengolahan suatu produk, sertifikasi halal menjadi sumber informasi yang membantu mereka dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, keberadaan sertifikasi halal berperan dalam

mengurangi ketidakpastian sekaligus meningkatkan keyakinan konsumen terhadap produk yang akan dikonsumsi.

Selain itu, sebagian besar informan mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih yakin dan nyaman ketika membeli produk yang telah memiliki sertifikasi halal. Sebaliknya, produk yang tidak memiliki sertifikasi halal sering kali menimbulkan keraguan, terutama apabila produk tersebut merupakan produk olahan yang mengandung berbagai bahan tambahan. Keraguan tersebut muncul karena konsumen tidak dapat memastikan secara langsung asal-usul bahan maupun proses produksi yang digunakan. Dalam kondisi demikian, sertifikasi halal menjadi salah satu dasar yang digunakan untuk menentukan apakah suatu produk layak untuk dipilih atau tidak.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian (Saputro 2023) yang menunjukkan bahwa konsumen cenderung memilih produk halal karena dianggap lebih aman, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip syariah. Persepsi positif terhadap produk halal tersebut pada akhirnya membentuk kecenderungan untuk memilih produk yang memiliki jaminan kehalalan yang jelas. Dalam konteks penelitian ini, sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai bukti kepatuhan terhadap ketentuan agama, tetapi juga sebagai sarana yang memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi.

Selain faktor kehalalan itu sendiri, dalam menentukan pilihan produk sebagian masyarakat Banjarmasin juga disebabkan oleh hubungan sosial yang terjalin dengan penjual atau produsen. Beberapa informan mengaku lebih yakin membeli produk dari pedagang Muslim yang telah mereka kenal dan percayai dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini terutama ditemukan pada pembelian makanan siap saji di warung makan atau usaha kecil di lingkungan sekitar. Kepercayaan yang terbentuk melalui interaksi sosial tersebut turut memengaruhi preferensi konsumen, sehingga pada situasi tertentu mereka tetap bersedia membeli produk meskipun belum memiliki sertifikasi halal resmi.

Namun, kepercayaan tersebut tidak sepenuhnya menggantikan peran sertifikasi halal. Pada produk kemasan atau produk olahan yang bahan dan proses produksinya tidak dapat diketahui secara langsung, masyarakat cenderung lebih mengandalkan sertifikasi halal sebagai dasar pertimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan sosial dan sertifikasi halal sama-sama berperan dalam membentuk preferensi konsumen, tetapi digunakan dalam konteks yang berbeda.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Banjarmasin menjadikan sertifikasi halal sebagai salah satu pertimbangan penting dalam memilih produk. Walaupun terdapat perbedaan dalam urutan prioritas dan pertimbangan lain yang menyertai keputusan pembelian, seluruh informan tetap memandang keberadaan

sertifikasi halal sebagai aspek yang tidak dapat diabaikan dalam proses konsumsi.